

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz,2014, *makalah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus*.
- Bastian, Indra.2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta:Salemba Empat.
- DEPUTI IV BPKP.(2005). *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta: BPKP.
- Febianto, Yustian,2005,*refrensi skripsi sarajana SI universitas muhammadiyah, Ilmu Pemerintahan*.
- Irwan Taufiq Ritonga 2010, *perencanaan dan penganggaran keuangan daerah di Indonesia, sekolah pascasarjana UGM*.
- Kartiwa, *Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dan Arah Kebijakan Umum*. "Makalah Pelatihan Pendalaman Kompetensi bidang tugas legislatif anggota DPRD Kabupaten Sukabumi", 2004
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mardiasmo, 2002,2004, *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*.
- Mardiasmo, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Makalah Seminar "Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia". Jakarta, 2002.
- Mardiasmo.2002.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Penerbit ANDI.
- Rahmad qosim,2006, *refrensi skripsi sarjana SI universitas muhammadiyah Yogyakarta, ilmu pemerintahan*.
- Romi Purwanda,2014, *ejurnal ilmu pemerintahan*.
- Tamanuri, 2008, *dok.kantor perpustakaan arsip daerah dan dokumentasi kabupaten waykanan tahun2008*.
- World Bank (2003) '*Kota-kota dalam Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan pada Era Desentralisasi Di Indonesia*.' East Asia Urban Working Paper Series, Dissemination Paper No. 7. Jakarta: World Bank
- Subroto, Agus. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008 )*, Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 2009.

## **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 1999. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia

## **Website**

Procurement, Selayang Pandang, <http://www.waykanankab.go.id>, postingan Tanggal 19 Juni 2014,

Ruwa Jurai, Way Kanan Raih WTP Keempat Kalinya , <http://www.saibumi.com>, postingan Rabu, 14 Mei 2014

Radar Lampung, Way Kanan Raih WTP, <http://www.bandarlampung.bpk.go.id>, postingan tanggal 16 Mei 2012